



GAR adalah salah satu perusahaan perkebunan minyak sawit terkemuka dengan lahan tertanam total seluas 485,606 hektar (termasuk perkebunan plasma) pada 31 Desember 2015, berlokasi di Indonesia. Perusahaan menjalankan operasi yang terintegrasi dengan berfokus pada produksi minyak dan lemak makan dari kelapa sawit.

Didirikan pada tahun 1996, GAR tercatat di Bursa Singapura sejak tahun 1999 dengan kapitalisasi pasar sebesar US\$3,1 milyar per 31 Desember 2015. Perusahaan investasi Flambo International Limited merupakan pemegang saham terbesar GAR dengan kepemilikan saham sebesar 50,35 persen. GAR memiliki beberapa anak perusahaan, termasuk PT SMART Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1992.

GAR berfokus pada produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Di Indonesia, aktivitas utamanya mencakup pembudidayaan dan pemanenan tanaman kelapa sawit; pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit dan inti sawit; mengolah minyak sawit menjadi produk dengan nilai tambah seperti minyak goreng, margarin dan shortening; serta memperdagangkan produk sawit ke seluruh dunia. Perusahaan juga beroperasi di Tiongkok dan India termasuk mengoperasikan pelabuhan laut dalam, pabrik pengolahan biji minyak tanaman, dan fasilitas pengolahan untuk produk minyak makan serta produk makanan lainnya seperti mie.



TONGGAK-TONGGAK GAR

	1997	2010	2011
KOMITMEN PADA KEBIJAKAN	Produsen minyak sawit pertama yang menganut kebijakan “tanpa pembakaran lahan” (zero-burning)	FEBRUARI Tidak beroperasi di lahan gambut dengan tingkat kedalaman berapapun	FEBRUARI GAR menjadi pionir dalam Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy) NOVEMBER GAR meluncurkan Kebijakan Keterlibatan Masyarakat (SCEP) dan Komunitas (GAR Social and Community Engagement Policy/GSEP)
KOMITMEN PADA IMPLEMENTASI			APRIL GAR masuk menjadi anggota RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil)
KOMITMEN PADA KEMAJUAN			MEI GAR mempublikasikan Laporan Upaya Berkelanjutan (Sustainability Report) pertamanya JUNI GAR memberikan presentasi dalam REDD+ Exchange 2011 di Oslo SEPTEMBER GAR memberikan presentasi dalam Konferensi Hutan Indonesia (Forests Indonesia Conference)



2012	2013	2014	2015
FEBRUARI GAR dan SMART meluncurkan Kebijakan Peningkatan Produktivitas (Yield Improvement Policy/YIP)			SEPTEMBER GAR meluncurkan Kebijakan Sosial dan Lingkungan (GAR Environmental and Social Policy)
	MARET GAR dan SMART mengimplementasikan High Carbon Stock (HCS) Forest Conservation Pilot	MEI GAR meluncurkan GAR Sustainability Dashboard (GSD)	MARET GAR mengimplementasikan Pemetaan Partisipatif (Participatory Mapping) sebagai bagian dari Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior Informed Consent/FPIC) MEI GAR meluncurkan informasi GSD untuk bagian hilir
APRIL GAR memberikan presentasi dalam Responsible Palm Oil Conference oleh TFT di London JUNI GAR dan Greenpeace mempublikasikan Laporan Studi Hutan HCS OKTOBER GAR memberikan presentasi dalam "Ethical Corporation – 7th Annual Sustainable Supply Chain Summit" NOVEMBER GAR memberikan presentasi dalam 10th Annual Roundtable Meeting on Sustainable Palm Oil	OKTOBER GAR menerbitkan laporan untuk enam bulan pertama dari HCS Forest	FEBRUARI GAR memperluas implementasi FCP hingga ke bagian operasi mereka di hilir JULI GAR menerbitkan laporan kemajuan pertama tentang YIP SEPTEMBER GAR mendeklarasikan "New York Declaration on Forests" di UN Climate Summit 2014	APRIL GAR dan HCS Approach Steering Group menerbitkan HCS Approach Toolkit



PENDAHULUAN

Kami berkomitmen untuk mencapai standar tertinggi dalam kualitas dan integritas, menanamkan keberlanjutan di semua lini operasi kami, dan memberdayakan masyarakat serta komunitas. Kami mengadopsi perbaikan kebijakan keberlanjutan ini untuk membantu mencapai tujuan melalui seluruh rantai pasok kami. Selain itu, kami berkomitmen penuh untuk menaati Prinsip dan Kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

Pada bulan Februari 2011 kami menerbitkan Kebijakan Konservasi Hutan (KKH), yang merupakan komitmen kami untuk memutuskan hubungan produksi minyak sawit dengan deforestasi. Pada bulan November 2011, kami memberlakukan Kebijakan Sosial dan Keberperanan Komunitas untuk memandu dan mengarahkan pengambilan keputusan yang terkait dengan masyarakat. Kebijakan tersebut menyangkut Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat adat dan komunitas lokal, penanganan keluhan, penyelesaian konflik, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM). Pada bulan Februari

2012 kami juga menetapkan Kebijakan Peningkatan Produktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi, sehingga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kemudian, pada bulan Juni 2012 kami menerapkan Kebijakan Perlindungan Satwa Liar yang Langka dan Terancam Punah.

Pada bulan Maret 2013 kami mengumumkan pelaksanaan proyek percontohan konservasi hutan ber-Stok Karbon Tinggi (SKT) di Kalimantan Barat, Indonesia. Dalam proyek ini kami melibatkan pemangku kepentingan dari masyarakat, Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan industri. Tujuan kami adalah membangun kerangka kerja untuk menyukseskan konservasi hutan SKT untuk industri minyak sawit secara keseluruhan.

Kami percaya bahwa kolaborasi adalah cara terbaik untuk menemukan solusi bagi produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Kami menyambut baik peningkatan jumlah perusahaan produsen dan pengguna yang membuat komitmen KKH serupa, dengan menjadikan metodologi SKT yang pertama dikembangkan GAR, Greenpeace, dan The Forest Trust (TFT) sebagai acuan.



RUANG LINGKUP

Kami mengadopsi kebijakan ini di semua lini operasi hulu dan hilir minyak sawit yang kami miliki, kelola, atau investasi, terlepas dari berapa pun besarnya porsi kepemilikan kami. Kami juga mewajibkan pemasok pihak ketiga atau yang memiliki hubungan dagang dengan kami untuk mematuhi kebijakan ini.

Untuk mempromosikan kebijakan ini dalam industri minyak sawit, kami akan memanfaatkan posisi kami di berbagai forum pemangku kepentingan dan mendukung kebijakan ini dalam bermitra dengan para pemangku kepentingan.

Empat tahun pasca peluncuran, kami telah mengkaji KKH untuk menjawab tantangan baru di bidang sosial dan lingkungan seiring perkembangan upaya keberlanjutan kami. Kebijakan tersebut meliputi Pengelolaan Lingkungan, Keberperanan Sosial dan Komunitas, Lingkungan Kerja dan Hubungan Industrial, serta Perdagangan dan Rantai Pasok. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai kebijakan kami yang telah diperbarui.

KOMITMEN DASAR

Kami ingin memastikan bahwa lini operasi hulu dan hilir minyak sawit GAR bebas dari deforestasi, dapat ditelusuri, dan membawa manfaat bagi masyarakat dan komunitas di mana Perusahaan beroperasi. Inti dari komitmen dasar ini adalah:



PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- 1.1 Tidak membangun di hutan Stok Karbon Tinggi dan melakukan konservasi di hutan Stok Karbon Tinggi
- 1.2 Tidak membangun di area ber-Nilai Konservasi Tinggi dan melakukan konservasi di area Nilai Konservasi Tinggi
- 1.3 Tidak membangun di lahan gambut dan melakukan konservasi di lahan gambut berapa pun kedalamannya
- 1.4 Tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan baru, penanaman kembali, atau pengembangan lainnya
- 1.5 Peningkatan produktivitas secara berkelanjutan untuk mengurangi tekanan pengembangan lahan baru tanpa intensifikasi pemakaian pestisida dan pupuk kimia
- 1.6 Melaporkan dan mengurangi emisi gas rumah kaca
- 1.7 Meningkatkan pengelolaan limbah
- 1.8 Meningkatkan penghematan energi



KEBERPERANAN SOSIAL DAN KOMUNITAS

- Menghormati Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, peraturan perundangan nasional, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi tentang HAM dan masyarakat adat. Hal ini meliputi:
- 2.1 Menghormati hak PADIATAPA masyarakat adat dan komunitas lokal serta pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat terhadap ketahanan pangan di daerah pengembangan baru
 - 2.1.1 *Penanganan keluhan dan ketidakpuasan yang bertanggung jawab*
 - 2.1.2 *Pencapaian resolusi konflik yang bertanggung jawab*
 - 2.1.3 *Peran terbuka dan konstruktif dari pemangku kepentingan lokal, nasional, dan internasional*
 - 2.2 Pembangunan ekonomi, sosial, dan komunitas yang positif
 - 2.2.1 *Memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan komunitas*
 - 2.2.2 *Melibatkan petani dan pengusaha lokal sebagai pemasok*
 - 2.2.3 *Menghormati HAM*
 - 2.2.4 *Menghormati hak kepemilikan lahan*



LINGKUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Mengakui, menghormati, dan memperkuat hak-hak semua pekerja



PERDAGANGAN DAN RANTAI PASOK

- 4.1 Rantai pasok yang dapat ditelusuri dan transparan
- 4.2 Dukungan terhadap pemasok
- 4.3 Uji tuntas dan prosedur penanganan keluhan
- 4.4 Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan nasional terkait serta prinsip dan kriteria sertifikasi internasional yang relevan

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1.1 Tidak membangun di hutan Stok Karbon Tinggi dan melakukan konservasi di hutan Stok Karbon Tinggi

Kami tidak akan membangun di Hutan SKT dan akan melakukan konservasi semua area SKT yang teridentifikasi dalam semua area konsesi kami.

Kami berkomitmen untuk mendukung penuh implementasi metodologi Pendekatan SKT yang diawasi dan dikembangkan oleh *High Carbon Stock(HCS) Approach Steering Group* dan mempromosikan penerapan konsep ini dalam industri minyak sawit.¹

Kami menyadari bahwa untuk melakukan konservasi hutan SKT:

- Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta pemangku kepentingan lainnya harus berperan dalam upaya konservasi hutan SKT. Peraturan baru dan peraturan perundang-undangan terkait sebaiknya sejalan dengan standar SKT guna memungkinkan terwujudnya transformasi industri minyak sawit.
- Semua pemain utama industri minyak sawit Indonesia sebaiknya mengadopsi metodologi SKT.

Sebagaimana didefinisikan dalam *HCS Approach Toolkit*, enam strata vegetasi berikut telah diidentifikasi:



- Hutan Kerapatan Tinggi – Sisa hutan alam atau hutan sekunder dengan kondisi mendekati hutan primer
- Hutan Kerapatan Sedang – Sisa hutan alam, tetapi kondisinya lebih terganggu dibandingkan Hutan Kerapatan Tinggi
- Hutan Kerapatan Rendah – Tampak seperti sisa hutan alam, tapi kondisinya sangat terganggu dan sedang dalam pemulihan
- Hutan Regenerasi Muda – Didominasi pohon-pohon muda yang sedang tumbuh kembali menjadi hutan, tetapi sesekali masih ditemui sisa hutan yang lebih tua
- Belukar– lahan yang baru dibuka, beberapa tanaman kayu yang baru tumbuh, dan rerumputan yang menutupi tanah
- Lahan Terbuka – lahan yang baru dibuka, didominasi oleh rerumputan atau tanaman pangan serta beberapa tanaman berkayu

Hutan SKT terdiri dari Hutan Kerapatan Tinggi, Sedang, dan Rendah serta Hutan Regenerasi Muda. GAR akan terus menerapkan *HCS Approach Toolkit*, termasuk setiap perbaikan terhadap standar tersebut yang dilakukan di masa mendatang.



Metodologi Pendekatan SKT akan terus-menerus diperbaiki untuk diterapkan di berbagai kawasan di dunia. Kami akan berperan aktif bersama para pemangku kepentingan dan mendukung pendekatan *HCS Steering Group* dalam menentukan dan menerapkan standar yang tepat di setiap lini operasi kami.

Kami juga akan berusaha mencari cara agar komunitas lokal memperoleh manfaat melalui partisipasi dalam upaya konservasi hutan SKT.

1.2 Tidak membangun di area ber-Nilai Konservasi Tinggi dan melakukan konservasi di area Nilai Konservasi Tinggi

Sejalan dengan komitmen yang kami luncurkan pada 4 Februari 2010, kami akan memastikan bahwa tidak ada alih fungsi area Nilai Konservasi Tinggi (NKT).

NKT akan dikelola sesuai prosedur dan pedoman yang ditetapkan dalam *High Conservation Value (HCV) Toolkit* yang berlaku di Indonesia, atau *HCV Toolkit* yang berlaku di negara tempat Perusahaan beroperasi, dan *HCV Resource Network*.² Kami akan memastikan bahwa penilaian NKT dilakukan oleh penyedia layanan yang kredibel dengan hasil penilaian tersedia bagi publik. Kami



juga akan bekerja sama dengan komunitas pemangku kepentingan yang lebih luas untuk mengidentifikasi dan melibatkan para ahli yang tepat saat penilai NKT yang kompeten dan kredibel tidak tersedia.

Kami akan melakukan konservasi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan serta menghormati kebutuhan dasar dan nilai-nilai budaya, sebagai bagian dari kebijakan kami untuk melindungi kawasan NKT. Kami akan:

- Melakukan konservasi dan melindungi kawasan sempadan sungai, daerah resapan air, dan jasa lingkungan lainnya
- Melakukan konservasi dan melindungi kawasan alami yang memiliki arti penting untuk kebutuhan dasar, termasuk area yang dibutuhkan untuk memenuhi ketahanan pangan, dan nilai-nilai budaya komunitas setempat
- Mendidik karyawan, kontraktor, dan masyarakat setempat serta pemangku kepentingan terkait tentang pentingnya melakukan konservasi kawasan NKT
- Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat pengelolaan dan pemantauan kawasan NKT di perkebunan kami dan di lanskap disekitarnya
- Melestarikan dan melindungi spesies langka, terancam, dan hampir punah, dan ekosistem serta habitat penting dari spesies yang langka, terancam dan hampir punah.
- Melarang perburuan satwa liar, termasuk spesies langka, terancam, dan hampir punah di perkebunan kami
- Menyelidiki setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini seperti berburu, memelihara, melukai, menyiksa, dan membunuh spesies langka, terancam dan hampir punah; dan mengambil tindakan disiplin, termasuk pemutusan hubungan kerja

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Untuk menyukseskan upaya konservasi hutan, kami akan bekerja sama dengan komunitas lokal melalui negosiasi kesepakatan yang secara optimal dapat melindungi kawasan NKT/SKT sekaligus hak-hak komunitas lokal.

1.3 Tidak membangun di lahan gambut dan melakukan konservasi serta pengelolaan di lahan gambut berapa pun kedalamannya

- Kami tidak akan membangun di lahan gambut³ berapa pun kedalamannya di areal konsesi kami
- Kami akan mengadopsi dan mengimplementasikan Praktik Pengelolaan Terbaik untuk lahan gambut, seperti yang dikembangkan oleh pakar gambut terkemuka melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan komunitas, untuk mengelola fungsi ekologis lahan gambut di area konsesi kami dan lanskap sekitarnya.
- Kami akan mengembangkan strategi untuk:
 - Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencegah subsiden lahan gambut di perkebunan kami;
 - Rehabilitasi lahan gambut jangka panjang;
 - Konservasi lahan gambut berhutan dan lanskap lahan gambut kritis



1.4 Tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan baru, penanaman kembali, atau pengembangan lainnya

Kami tetap mempertahankan kebijakan tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan baru. Kami berkomitmen pada penegakan kebijakan yang tegas di semua kegiatan operasional kami, termasuk persiapan penanaman baru, penanaman kembali, atau kegiatan pengembangan lainnya.

1.5 Peningkatan produktivitas secara berkelanjutan untuk mengurangi tekanan pengembangan lahan baru tanpa intensifikasi pemakaian pestisida dan pupuk kimia⁴

Kami memiliki komitmen jangka panjang pada penelitian ilmiah. Secara khusus, kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas minyak sawit di perkebunan kami serta perkebunan plasma. Peningkatan produktivitas ini akan mengurangi tekanan untuk





membuka lahan baru dan meningkatkan mata pencaharian petani plasma.

Kami akan terus mengembangkan praktik terbaik terkait bibit tanaman, praktik agronomi, manajemen perkebunan, dan kesesuaian lahan.

Kami menyadari adanya perhatian yang diberikan pada penggunaan pupuk kimia dan pestisida, dan bertujuan untuk mengurangi pemakaian pupuk dan pestisida kimia. Melalui kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional, kami akan menghapus secara bertahap penggunaan bahan kimia berbahaya. Kami akan menghentikan pemakaian parakuat.

1.6 Melaporkan dan mengurangi emisi gas rumah kaca

Kami akan mengidentifikasi, memantau, dan secara publik melaporkan semua sumber GRK di seluruh lini operasi sesuai prinsip dan kriteria sertifikasi internasional. Emisi GRK akan dikurangi secara bertahap di seluruh lini operasi melalui penerapan praktik

pengelolaan terbaik dan rencana aksi untuk mencapai target pengurangan yang telah ditetapkan.

1.7 Meningkatkan pengelolaan limbah

Mengidentifikasi, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan membuang sampah dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

1.8 Meningkatkan penghematan energi

Mempromosikan penghematan energi di seluruh lini operasi kami.

1 http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2015/04/HCS-Approach-Toolkit_Full-version.pdf
2 <https://www.hcvnetwork.org/>
3 Lahan gambut saat ini didefinisikan sebagai lahan dengan kandungan bahan organik lebih dari 65% dan kedalaman lebih dari 40 cm. Definisi ini lebih lanjut tunduk pada hasil kajian peer review (ikuti perkembangan terkait SOP Gambut).
4 Silakan lihat Kebijakan Peningkatan Produktivitas untuk rincian lebih lanjut dari komitmen kebijakan kami.

KEBERPERANAN SOSIAL DAN KOMUNITAS

2.1 Menghormati hak PADIATAPA masyarakat adat dan komunitas lokal

PADIATAPA mengacu pada hak komunitas lokal, terutama masyarakat adat, untuk memberikan atau menolak untuk memberikan persetujuan terkait isu-isu yang berdampak terhadap mereka. GAR menghormati dan mengakui hak-hak adat dari masyarakat adat, lokal, dan komunitas yang bermukim di hutan yang sudah ada sejak dahulu pada tanah adat dan tanah ulayat mereka, serta berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan PADIATAPA di komunitas tersebut sebelum memulai setiap kegiatan pengembangan dan konservasi lahan. Untuk pembebasan lahan, pelaksanaan kebijakan ini akan mencakup:

- Pemetaan Partisipatif dan Studi Kepemilikan Lahan untuk semua lahan masyarakat adat dan komunitas lokal sebelum negosiasi dilakukan
- Penilaian Dampak Sosial dilakukan dengan metode partisipatif, yang hasilnya akan dapat diakses oleh publik dan diinformasikan secara aktif kepada pemangku kepentingan terkait
- Proses negosiasi yang terbuka dan melibatkan para pemangku kepentingan
- Dokumentasi kesepakatan yang ditandatangani oleh dan digunakan bersama semua pihak terkait

PADIATAPA, Penilaian Dampak Sosial partisipatif, dan perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif bersama masyarakat adat dan komunitas lokal ditujukan untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam mempertahankan hutan dan lahan pertanian mereka. Sebelum dilakukan pembukaan lahan, kami akan melakukan penilaian ketahanan pangan dan memastikan bahwa lahan yang digunakan untuk tanaman pangan



guna memenuhi kebutuhan masyarakat tidak akan dialihfungsikan dan ditanami oleh Perusahaan.

2.1.1 Penanganan keluhan dan ketidakpuasan yang bertanggung jawab

Kami akan mengembangkan dan menjaga proses pengaduan formal untuk menangani semua keluhan dan ketidakpuasan secara bertanggung jawab di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Proses ini akan dikembangkan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan, dan dapat diakses oleh publik.

2.1.2 Pencapaian resolusi konflik yang bertanggung jawab

Kami berkomitmen untuk secara aktif mempromosikan dan mendukung penyelesaian yang bertanggung jawab dari setiap konflik yang melibatkan operasi GAR, bersama pihak berwenang terkait pada saat terjadinya konflik. Ini akan mencakup bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa sistem resolusi konflik yang seimbang, akuntabel, disepakati bersama, dan terdokumentasi dapat diakses oleh petani plasma, masyarakat adat, komunitas lokal, dan pihak terdampak lainnya dalam rangka menangani keluhan, ketidakpuasan, dan menyelesaikan konflik secara memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat berlandaskan penghormatan terhadap hak-hak hukum dan adat mereka, termasuk tanah dan sumber daya, serta hak mereka untuk memberikan atau menolak untuk memberikan persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal sebelum dilaksanakan





pengembangan di lahan mereka. Sistem ini akan mencakup pemetaan semua konflik dalam operasi GAR, penyusunan rencana aksi untuk mengatasi konflik yang teridentifikasi, pemantauan dan pelaporan yang transparan, pilihan untuk komunitas lokal dan atau masyarakat adat untuk mengakses nasihat hukum dan teknis yang independen, kebebasan bagi pihak yang mengajukan keluhan untuk memilih individu atau kelompok yang mendukung mereka dan/atau bertindak sebagai pengamat, serta pilihan untuk menggunakan pihak ketiga sebagai mediator.

Kami benar-benar menolak penggunaan kekerasan dalam sengketa dengan pihak mana pun.

2.1.3 Peran terbuka dan konstruktif dari pemangku kepentingan lokal, nasional, dan internasional

Kami berkomitmen untuk secara aktif dan konstruktif melibatkan semua pemangku kepentingan GAR, termasuk komunitas, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Hal ini mencakup komitmen untuk menyediakan informasi mengenai dampak operasi kami kepada publik. Kami akan berusaha memastikan bahwa informasi tersebut diberikan dalam format yang tepat dan bahasa yang dimengerti pemangku kepentingan yang terdampak. Kami juga berkomitmen pada negosiasi yang transparan dan terbuka untuk semua kegiatan pengelolaan bersama.



2.2 Pembangunan ekonomi, sosial, dan komunitas yang positif

2.2.1 Memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan komunitas

Kami akan terus mengembangkan dan melaksanakan program-program pembangunan yang memberdayakan masyarakat lokal di area operasi kami. Program-program ini akan dikembangkan melalui pendekatan terbuka, konsultatif, dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan setempat. Program pembangunan komunitas kami bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan.

2.2.2 Melibatkan petani dan pengusaha lokal sebagai pemasok

Kami mendukung masuknya petani plasma dan pengusaha lokal dalam rantai pasok yang berkelanjutan, dan bertujuan membantu mereka untuk mematuhi kebijakan keberlanjutan kami dalam kemitraan yang adil, transparan, dan akuntabel. Kami terus mendukung sepenuhnya pengembangan petani plasma dan berkomitmen meningkatkan produktivitas petani plasma. Kami memberikan bibit unggul, alih pengetahuan, dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan praktik pertanian terbaik.

2.2.3 Menghormati HAM

Kami berkomitmen untuk menegakkan dan mempromosikan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia PBB5 bagi semua pekerja, kontraktor, masyarakat adat, dan komunitas lokal di semua operasi Perusahaan.

2.2.4 Menghormati hak kepemilikan lahan

Kami mendukung *Voluntary Guidelines* FAO mengenai *Responsible Governance of Tenure*, yang mempromosikan kepemilikan yang aman dan akses yang adil terhadap tanah, perikanan, dan hutan sebagai sarana pemberantasan kelaparan dan kemiskinan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup. Kami menghormati kepemilikan lahan dengan menyadari kewajiban internasional yang telah diratifikasi oleh negara, dan konstitusi dan peraturan perundangan di negara tempat kami beroperasi.

LINGKUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Mengakui, menghormati, dan memperkuat hak-hak pekerja

Kami mengakui, menghormati, dan memperkuat hak-hak seluruh pekerja kami, termasuk pekerja kontrak, pekerja sementara, tenaga kerja lepas, dan buruh migran dari semua gender, sejalan dengan praktik terbaik internasional yang belum memiliki kerangka hukum, seperti Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.

Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak semua orang yang bekerja di semua lini operasi dan rantai pasok kami dihormati sesuai dengan peraturan daerah, hukum nasional, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi di negara tempat kami beroperasi. Kami memberi pekerja akses yang jelas untuk membenahi dan memastikan mekanisme keluhan yang transparan dan tepercaya.

Inti komitmen ini, yang juga tercermin dalam kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) kami, adalah bahwa prinsip-prinsip berikut berlaku bagi semua pekerja, termasuk tenaga kontrak, pekerja sementara, tenaga kerja lepas, dan buruh migran:

3.1 Praktik ketenagakerjaan secara bertanggung jawab

- 3.1.1 Proses rekrutmen yang beretika, termasuk melarang praktik pengenaan biaya kepada pekerja dalam perekrutan dan menahan dokumen identitas
- 3.1.2 Melarang mempekerjakan anak-anak dan mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan



tenaga kerja anak dalam kegiatan kami. Melakukan tindakan korektif apabila ditemukan tenaga kerja anak dan memastikan tindak lanjut yang tepat serta memberikan bantuan perlindungan keselamatan

- 3.1.3 Memastikan akses pendidikan bagi semua anak yang orang tua/walinya bekerja di perkebunan
- 3.1.4 Melarang kerja paksa atau terikat (ijon) dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi dalam kegiatan kami. Melakukan tindakan korektif apabila ditemukan kasus tersebut untuk memastikan korban kerja paksa dirujuk ke layanan yang ada untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan
- 3.1.5 Menyediakan kontrak kerja dalam bahasa yang dapat dipahami bagi seluruh pekerja
- 3.1.6 Memastikan administrasi penggajian, termasuk pembayaran, jadwal, dan bahasa yang digunakan sederhana, tepat waktu, dan jelas
- 3.1.7 Memastikan semua pekerja menerima upah yang sama dengan atau melebihi ketentuan upah minimum yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Target produksi



digunakan dalam perhitungan premi diatas upah minimum

- 3.1.8 Memastikan jam kerja memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3.1.9 Memastikan kerja lembur dilakukan secara sukarela dan diberikan kompensasi sesuai peraturan perundangan ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

3.2 Kebebasan berserikat dan keberagaman di tempat kerja

- 3.2.1 Menghormati kebebasan berserikat pekerja dan hak mereka untuk melakukan perundingan bersama
 - Kami tidak akan mencampuri kegiatan organisasi pekerja, perwakilan pekerja, atau perwakilan serikat pekerja
 - Kami akan mengizinkan perwakilan pekerja untuk menggunakan fasilitas di lokasi dan memasuki area kerja Perusahaan untuk melaksanakan tugas mereka secara efisien,



dengan tidak mengganggu kegiatan operasional Perusahaan

- Kami tidak akan melarang, membatasi, atau menghambat aksi mogok yang sesuai dengan peraturan perundangan. Bila terjadi aksi mogok yang sesuai dengan peraturan perundangan, kami tidak akan mempekerjakan pekerja pengganti

LINGKUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

- 3.2.2 Memastikan keberagaman tenaga kerja
- 3.2.3 Tidak mentoleransi tindakan pelecehan seksual dan semua bentuk pelecehan serta kekerasan lainnya

3.3 Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

- 3.3.1 Memastikan perkebunan dan pabrik kelapa sawit memiliki kebijakan K3
- 3.3.2 Memastikan analisa risiko Kesehatan & Keselamatan Kerja dilaksanakan dan rencana aksi terkait dijalankan
- 3.3.3 Memastikan semua manajer dan pekerja menerima pelatihan Kesehatan & Keselamatan Kerja yang sesuai dengan skala kegiatan operasional. Memastikan semua pelatihan terdokumentasi dan catatan kegiatan pelatihan disimpan dengan baik
- 3.3.4 Memastikan terdapat prosedur pelaporan kinerja K3 secara teratur oleh perkebunan dan pabrik kelapa sawit, termasuk dalam evaluasi kinerja kontraktor/pemasok, dan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan
- 3.3.5 Memastikan pekerja, komunitas lokal, dan lingkungan terlindungi dari paparan bahan kimia berbahaya. Pestisida yang dikategorikan Kelas 1A atau 1B World Health Organization (WHO) berdasarkan Konvensi Stockholm atau Rotterdam tidak digunakan, kecuali dalam situasi tertentu
- 3.6 Memberikan asuransi kecelakaan kerja bagi semua pekerja di lokasi yang mencakup perawatan medis untuk penyakit dan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, dan kompensasi untuk penyakit



dan cedera terkait pekerjaan yang menyebabkan kematian atau cacat tetap

- 3.3.7 Memastikan ada proses untuk pencairan klaim asuransi bagi keluarga terdekat pekerja bila terjadi kasus kematian atau pekerja yang dipulangkan. Memastikan semua pembayaran terdokumentasi
- 3.3.8 Menyediakan perumahan yang layak dan memadai di perkebunan, fasilitas pengobatan dan kesejahteraan kepada pekerja yang dipekerjakan secara langsung beserta keluarganya

Kami memberikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja, dan merangkul keberagaman tanpa memandang etnis, agama, cacat tubuh, gender, afiliasi politik, orientasi seksual, atau keanggotaan serikat pekerja. Kami memastikan pekerja dilindungi dari tindakan diskriminasi dalam seluruh tahap hubungan ketenagakerjaan.

Kami menghargai dan mendukung partisipasi dan kemajuan pekerja wanita di lingkungan kerja.



PERDAGANGAN DAN RANTAI PASOK



4.1 Rantai pasok yang dapat ditelusuri dan transparan

Kami berkomitmen untuk membangun rantai pasok yang dapat ditelusuri dan transparan yang mencakup hingga ke petani. Kami bertekad mencapai kemamputelusuran penuh hingga pabrik kelapa sawit pada akhir 2015. Kami akan menerbitkan jadwal kerja pada triwulan pertama 2016 untuk kemamputelusuran hingga kebun kelapa sawit.

4.2 Dukungan terhadap pemasok

Pemasok kami memegang peranan penting dan kami akan terus secara konstruktif melibatkan mereka, khususnya terkait peningkatan dan penerapan praktik-praktik minyak sawit berkelanjutan.

Kami akan meninjau kembali hubungan bisnis dengan semua pemasok yang didapati melanggar kebijakan kami. Kami menyadari bahwa pemasok mungkin memerlukan waktu untuk memenuhi persyaratan kebijakan kami. Kami akan bekerja sama dengan mereka melalui keterlibatan langsung untuk mendorong dan mendukung mereka untuk melakukan tindakan korektif dalam kurun waktu tertentu guna memperbaiki setiap pelanggaran.

Kami secara sadar tidak akan menerima pasokan dari pemasok yang menolak mematuhi kebijakan ini. Kami akan berhenti berbisnis dengan pemasok yang tidak mematuhi kebijakan ini secara berulang, atau pemasok yang tidak dapat menunjukkan komitmen atau upaya untuk memperbaiki ketidakpatuhan pada kebijakan kami, termasuk kegagalan untuk melaksanakan rencana tindakan korektif.

4.3 Uji tuntas dan prosedur penanganan keluhan

Kami akan menjalankan sistem uji tuntas yang kokoh yang dapat mengidentifikasi pemasok yang tidak patuh. Kami akan membangun sistem yang transparan dan terpercaya di mana pemangku kepentingan dapat menginformasikan persoalan yang terjadi di dalam rantai pasok kami. Kami akan menanggapi masalah tersebut menggunakan proses penanganan keluhan secara tepat waktu dan transparan.

4.4 Kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundangan serta prinsip dan kriteria sertifikasi internasional yang relevan

GAR akan terus mematuhi semua peraturan dan perundangan serta prinsip dan kriteria sertifikasi internasional yang relevan.

4.5 Implementasi

Kami memahami bahwa para pemasok dan mitra akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan praktik-praktik yang ada dengan kebijakan kami secara penuh. Kecepatan implementasi akan tergantung, dalam beberapa kasus, pada konteks nasional. Namun demikian, kami memahami terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan tidak ada lagi pembukaan lahan di kawasan NKT, hutan SKT, dan lahan gambut dalam rantai pasok kami; oleh karena itu, kami mengharuskan seluruh pemasok dan mitra kami untuk segera mengalihkan kegiatan pengembangan dari area NKT, SKT, dan gambut.

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Kami memahami bahwa seiring munculnya persoalan dan teknologi baru, kebijakan dan praktik baru perlu dikembangkan atau disesuaikan. Kami berkomitmen untuk mempertahankan pendekatan pembelajaran yang terbuka pada upaya mengelola dan menanggapi isu-isu baru yang muncul dalam proses pemantauan dan evaluasi.

Kami berkomitmen untuk secara transparan mengevaluasi dan melaporkan kinerja kami secara berkala dalam kaitannya dengan kebijakan ini melalui situs kami, laporan keberlanjutan, *GAR Sustainability Dashboard*⁶ dan keberperanan para pemangku kepentingan utama secara terus-menerus.

Kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang tepercaya untuk memverifikasi kepatuhan pemasok kami, mengaudit, dan mengevaluasi pelaksanaan serta pencapaian kebijakan ini.

Q Apa itu GSEP?

GAR Social and Environmental Policy (GSEP) merupakan kebijakan keberlanjutan kami yang telah ditingkatkan dan diperbarui. GSEP merepresentasikan babak selanjutnya dalam perjalanan kami menuju keberlanjutan. GSEP mengintegrasikan kebijakan-kebijakan keberlanjutan kami sebelumnya dalam satu dokumen.

Mengapa GAR meluncurkan GSEP padahal GAR telah memiliki kebijakan-kebijakan keberlanjutan?

Sebagai sebuah bisnis kami berkomitmen untuk terus-menerus mengevaluasi kemajuan kami mewujudkan praktek bisnis keberlanjutan dan mencari cara-cara untuk terus memperbaiki diri dan berinovasi. Pada 2011, kami membuat komitmen terhadap keberlanjutan yang membuka jalan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Selama empat tahun terakhir kami telah belajar banyak dan telah memperoleh

manfaat selama bekerja sama dengan aneka ragam pemangku kepentingan termasuk lembaga nirlaga, masyarakat setempat, dan pemerintah. Melalui pembelajaran dan kolaborasi inilah kami sekarang mampu meluncurkan dan menerapkan kebijakan yang telah ditingkatkan ini, yang mencerminkan seluruh pengalaman dan tantangan yang ada dalam mendorong praktek industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

Apa poin-poin penting GSEP?

Poin-poin penting GSEP mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pengelolaan Lingkungan

- Melestarikan dan tidak mengembangkan hutan-hutan stok karbon tinggi (high carbon stock)
- Melestarikan dan tidak mengembangkan daerah-daerah dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value)
- Melestarikan dan tidak mengembangkan lahan gambut dengan tingkat kedalaman berapapun

- Tidak melakukan pembakaran untuk penanaman baru, peremajaan, ataupun pengembangan lahan lainnya

Keterlibatan Sosial dan Masyarakat

- Menghormati hak masyarakat untuk memberikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) bagi penduduk asli dan masyarakat lokal
- Pembangunan ekonomi, sosial, dan masyarakat secara positif

Hubungan-hubungan di tempat kerja dan perburuhan

- Mengakui, menghormati, dan memperkuat hak semua pekerja kami

Pasar dan rantai pasokan

- Rantai pasokan yang terlacak dan transparan
- Mendukung pemasok
- Uji tuntas dan prosedur ketakpuasan
- Kepatuhan terhadap semua hukum nasional yang relevan serta prinsip dan kriteria sertifikasi internasional